

Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter Pemerintah Serta Kaitannya Dengan Teori Demokrasi

**Salsabila¹, Ananda Zhafir Assakhawi², Muhammad Adib Fathullah³,
Nurlaili Rahmawati⁴**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta – Indonesia

Abstract

This research aims to discuss consequences Leadership Authoritarian To Principles Democracy; Comparison Policies and Practices Government between Government Style Authoritarian and Democratic; as well as the implications of authoritarian leadership styles in various countries. Using method study descriptive with literature review. The results of this research are looking at the cases in countries with authoritarian leadership styles such as Russia, Venezuela, China, and Saudi Arabia, we can see that government authoritarian often produce situations where rights basic man become prone to. leadership authoritarian often creates situations where rights individual ignored or even treated with arbitrarily. So there needs to be global awareness about issues of human rights violations due to an authoritarian leadership style, in order the more big opportunity For push change positive in protection right basic more people and more democratic government all over the world.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Konsekuensi Kepemimpinan Otoriter Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi; Perbandingan Kebijakan dan Praktik Pemerintahan antara Gaya Pemerintahan Otoriter dan Demokratis; serta implikasi gaya kepemimpinan otoriter di berbagai negara. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan literatur review. Hasil dari penelitian ini adalah Melihat kasus-kasus di negara dengan gaya kepemimpinan otoriter seperti Rusia, Venezuela, Tiongkok, dan Arab Saudi, kita dapat melihat bahwa pemerintahan otoriter seringkali menghasilkan situasi di mana hak asasi manusia menjadi rentan. kepemimpinan otoriter seringkali menciptakan situasi di mana hak-hak individu diabaikan atau bahkan diperlakukan dengan semena-mena. Sehingga perlu adanya kesadaran global tentang isu-isu pelanggaran HAM karena gaya kepemimpinan otoriter, agar semakin besar peluang untuk mendorong perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan yang lebih demokratis di seluruh dunia.

Keywords: Leadership Style; Authoritarian; Democratic

¹ **Korespondensi:** Salsabila (salsabilacak@email.com), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15412

Pendahuluan

Pemimpin mempunyai peran yang besar dalam menentukan suatu kemajuan sebuah organisasi baik di tingkat yang paling kecil dan sederhana maupun dalam tingkat negara. Tidak ada satupun manusia yang tidak terikat dengan peran seorang pemimpin karena manusia sebagai makhluk sosial yang selalu terdorong untuk bekerjasama dengan orang lain serta ketidakmampuan seseorang untuk menacapai berbagai tujuan (Nasir et al., 2021). Menurut Sutarto sebagaimana dikutip Danny Permana, Kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi sikap serta perilaku orang lain untuk mengikuti atau mau bekerja sama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Permana, 2021). Kepemimpinan menjadi tulang punggung pengembangan organisasi, tujuan organisasi akan tercapai dengan adanya kepemimpinan yang baik (Gaol, 2022). Setiap kepemimpinan mempunyai ciri-ciri atau tipe-tipe serta mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung situasi, kondisi dan siapa yang mejalankannya. Misalnya tipe kepemimpinan militeristis bisa kita lihat dalam kepemimpinan Soeharto pada era orde baru, tipe

kepemimpinan paternalistik bisa kita lihat kepemimpinan guru terhadap murid nya, sedangkan tipe kepemimpinan otoriter bisa kita lihat seperti kepemimpinan saddam husein di Irak, Adolf Hitler di Jerman, Husni Mubarak di Mesir, Muammar Khadafi di Libya, dan lain-lain (Rahmat et al., 2018).

Kepemimpinan otoriter disebut juga dengan kepemimpinan direktif dan diktator. Menurut Malayu Hasibuan sebagaimana dikutip Berlina Lumban Gaol, Kepemimpinan otoriter adalah gaya memimpin dengan memusatkan segala sesuatu kebijakan dan keputusan yang diambil berasal dari dirinya sendiri secara penuh (Gaol, 2022). Gaya Kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan dimana sebagian besar kekuasaan atau kewenangan berada ditangan pemimpin yang bersifat sentralisasi. Pengambilan keputusan atau kebijakan ditentukan sendiri oleh pemimpin tanpa melibatkan dan mengikutsertakan ide, pendapat, gagasan, saran bawahan untuk mengambil keputusan (Rahmadhanty, Dwi Rizky Farah, 2020). Sehingga, pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin, sedangkan bawahan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin.

Gaya kepemimpinan otoriter seringkali dibenturkan dengan nilai prinsip demokrasi. Sehingga perlu dilakukan analisis kebijakan otoriter pemerintah dalam teori demokrasi adalah upaya untuk memahami bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah otoriter berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintahan. Analisis harus mencoba mengungkap alasan di balik kebijakan-kebijakan otoriter tersebut. Apakah tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan, mengendalikan oposisi politik, membatasi kebebasan individu.

Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan apakah ada potensi perubahan kebijakan atau transisi menuju sistem yang lebih demokratis. Faktor-faktor seperti tekanan domestik dan internasional, perubahan sosial, atau perubahan dalam struktur kekuasaan dapat mempengaruhi potensi perubahan tersebut. Akhirnya, analisis harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan-kebijakan otoriter. Bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat memengaruhi stabilitas politik, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam teori demokrasi, prinsip-prinsip seperti partisipasi politik yang inklusif, hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan akuntabilitas pemerintah adalah nilai-nilai kunci. Oleh karena itu, analisis kebijakan otoriter dalam konteks ini berfokus pada sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut sesuai atau melanggar nilai-nilai demokrasi ini, serta bagaimana mereka memengaruhi sistem politik dan masyarakat secara keseluruhan.

Terdapat banyak penelitian mengenai gaya kepemimpinan, namun sebagian besar membahas mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, diantaranya adalah *pertama*, jurnal yang ditulis oleh Lili Indrawati dan Etti Ernita Sembiring yang membahas tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja pegawai di Pemerintah Daerah (Indrawati & Sembiring, 2020). *Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Berlina Lumban Gaol, yang membahas tentang gaya kepemimpinan otoriter dan kepemimpinan Kristen terhadap karyawan (Gaol, 2022). *Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Husaini Abdullah, et al, yang membahas tentang pengaruh gaya kepemimpinan otoriter, demokrasi dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai pada badan pusat statistik Kabupaten Pidie (Abdullah et al., 2023).

Sedangkan artikel kami membahas tentang Konsekuensi Kepemimpinan Otoriter Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi; Perbandingan Kebijakan dan Praktik Pemerintahan antara Gaya Pemerintahan Otoriter dan Demokratis; serta implikasi gaya kepemimpinan otoriter di berbagai negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau topik penelitian dengan studi literatur baik dari buku, jurnal maupun berita online. Dalam konteks jurnal mengenai "Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter Pemerintah Serta Kaitannya dengan Teori Demokrasi," metode penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data yang ada serta literatur yang relevan.

Penelitian deskriptif dalam jurnal ini melibatkan analisis teks dan literatur yang mencakup pemahaman mendalam tentang konsep kepemimpinan otoriter dan demokrasi, serta studi kasus yang mendemonstrasikan hubungan antara kedua konsep tersebut. Penulis melakukan pencarian sumber-sumber

terkait, seperti buku, artikel, laporan organisasi hak asasi manusia, dan dokumen resmi pemerintah, untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang subjek penelitian. Selanjutnya, penulis menyajikan analisis yang rinci berdasarkan informasi yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam jurnal.

Konsekuensi Kepemimpinan Otoriter Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi

Otoriter atau otokratis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu: *autos* yang berarti sendiri dan *kratos* berarti kekuasaan atau kekuatan. Jadi, otokrasi bermakna berkuasa sendiri secara mutlak (*centre of authority*) (Kurniati & Amrizal, 2007). Kepemimpinan otoriter adalah jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin atau pemerintah memiliki kendali penuh atas keputusan dan kebijakan tanpa keterlibatan aktif dari warga negara atau mekanisme demokratis (Huntington, 1991). Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak dari kepemimpinan otoriter terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang mencakup partisipasi warga negara, perlindungan hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban pemerintah.

Penelitian ini akan membahas bagaimana kepemimpinan otoriter dapat memengaruhi prinsip-prinsip demokrasi, dengan fokus pada situasi di Indonesia.

Partisipasi warga negara adalah salah satu elemen kunci dalam sistem demokrasi yang sehat. Dalam pemerintahan otoriter, seringkali partisipasi warga negara dibatasi atau dibatalkan. Ini dapat terjadi melalui pembatasan kebebasan berbicara, pembatasan akses ke media independen, atau penindasan protes warga (Levitsky & Way, 2010). Di Indonesia, selama masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, partisipasi politik dibatasi dengan ketat, dan warga negara memiliki sedikit ruang untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut.

Namun, sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam hal partisipasi warga negara. Dengan jatuhnya rezim otoriter, warga negara Indonesia memiliki lebih banyak kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses politik (Honna, 2011). Pemilihan umum yang bebas dan adil telah menjadi ciri penting dari demokrasi Indonesia. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam menjaga partisipasi warga negara yang

tinggi, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil.

Perlindungan hak asasi manusia adalah elemen penting dalam demokrasi yang sehat. Dalam kepemimpinan otoriter, hak asasi manusia sering kali diabaikan atau dilanggar. Di Indonesia, selama masa pemerintahan otoriter, banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi, termasuk kasus-kasus seperti penculikan, penyiksaan, dan pembungkaman oposisi politik.

Namun, sejak reformasi, Indonesia telah berusaha memperbaiki catatan hak asasi manusia negara. Hal ini melibatkan pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), yang bertugas untuk memantau dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun masih ada beberapa tantangan, seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, terdapat kemajuan yang signifikan dalam upaya menjaga hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks demokrasi yang berkembang (Hadiz, 2004).

Demokrasi membutuhkan pertanggungjawaban pemerintah sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di bawah kepemimpinan otoriter, pertanggungjawaban sering diabaikan,

dan tindakan pemerintah tidak selalu diperiksa atau dipertanyakan. Dalam konteks Indonesia, rezim Soeharto dikenal dengan kurangnya pertanggungjawaban pemerintah terhadap tindakan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sejak reformasi, Indonesia telah berusaha untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pemerintah. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berhasil mengusut dan menuntut pejabat pemerintah korup. Namun, KPK juga menghadapi tantangan dan gangguan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pemerintah masih merupakan aspek yang terus berkembang dalam proses demokratisasi Indonesia (Transparency International Indonesia, 2020).

Dalam analisis dampak kepemimpinan otoriter terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, terlihat adanya perubahan positif sejak reformasi tahun 1998. Partisipasi warga negara telah meningkat, hak asasi manusia mendapat lebih banyak perlindungan, dan pertanggungjawaban pemerintah semakin ditegakkan. Namun, tetap ada tantangan yang harus diatasi dalam menjaga perkembangan

demokrasi yang sehat. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga partisipasi warga negara yang tinggi, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah. Dalam proses ini, peran masyarakat sipil, lembaga-lembaga independen, dan komitmen terus-menerus untuk memperkuat demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa dampak negatif kepemimpinan otoriter terhadap demokrasi dapat diminimalkan (Komnas HAM, 2022).

Perbandingan Kebijakan dan Praktik Pemerintahan antara Gaya Pemerintahan Otoriter dan Demokratis

Perbedaan antara pemerintahan otoriter dan demokratis memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan dan praktik pemerintahan suatu negara. Kepemimpinan otoriter ditandai oleh kontrol yang kuat dari pemerintah atau individu tertentu, sedangkan dalam sistem demokratis, kebijakan dan praktik pemerintahan lebih terbuka dan melibatkan partisipasi warga negara. Dalam konteks Indonesia, kita akan mengevaluasi perbedaan signifikan dalam kebijakan dan praktik pemerintahan antara masa

pemerintahan otoriter dan era demokrasi pasca-reformasi.

Kebijakan pemerintahan adalah salah satu area di mana perbedaan antara pemerintahan otoriter dan demokratis dapat terlihat dengan jelas. Dalam masa pemerintahan otoriter, kebijakan sering kali ditetapkan secara otoriter, tanpa keterlibatan masyarakat sipil atau mekanisme demokratis. (Mietzner, 2013) Contohnya adalah era Soeharto di mana kebijakan pembangunan ekonomi dan politik dikendalikan oleh pemerintah pusat tanpa partisipasi yang signifikan dari warga negara.

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah melanjutkan untuk menerapkan kebijakan yang lebih inklusif. Kebijakan saat ini dibuat dengan lebih banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Contoh dari hal ini adalah penyusunan Undang-Undang Otonomi Daerah yang memungkinkan daerah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah indikasi perubahan signifikan dalam pendekatan pembuatan kebijakan di era demokrasi (Suryadinata, 2004).

Transparansi adalah komponen penting dalam pemerintahan yang

demokratis. Dalam pemerintahan otoriter, seringkali informasi pemerintah ditutup-tutupi atau dikontrol secara ketat, yang dapat mengarah pada ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Di masa pemerintahan Soeharto, ada sedikit transparansi dalam hal penggunaan dana publik dan kebijakan pemerintah (Aspinall, 2007).

Namun, dalam era demokrasi pasca-reformasi, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Undang-Undang Kebebasan Informasi menyediakan kerangka kerja yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi publik. Selain itu, peningkatan pengawasan masyarakat sipil dan media independen telah membantu mengungkap berbagai isu yang memerlukan transparansi, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berkontribusi pada praktik pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Partisipasi warga negara adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokratis yang sehat. Dalam pemerintahan otoriter, partisipasi sering kali dibatasi, dan warga negara memiliki sedikit pengaruh dalam proses

pengambilan keputusan. Era Soeharto adalah contoh di mana partisipasi politik sangat terbatas, dan oposisi politik ditekan.

Sejak reformasi, partisipasi warga negara telah mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. Pemilihan umum yang bebas dan adil telah memberikan warga negara hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Selain itu, Indonesia telah mengalami perkembangan masyarakat sipil yang aktif, dengan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak warga negara dan mengawasi tindakan pemerintah (Aspinall, 2013). Warga negara memiliki lebih banyak peluang untuk mengungkapkan pandangan mereka dan memengaruhi pembuatan kebijakan.

Perlindungan hak asasi manusia adalah indikator penting dalam mengevaluasi perbedaan antara pemerintahan otoriter dan demokratis. Di bawah kepemimpinan otoriter, hak asasi manusia sering kali diabaikan atau bahkan dilanggar. Di Indonesia, masa Soeharto ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis politik.

Sejak reformasi, Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.

Pembentukan Komnas HAM adalah langkah penting dalam memantau dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun masih ada tantangan dalam hal ini, terdapat kemajuan dalam hal penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Perbedaan antara pemerintahan otoriter dan demokratis memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan dan praktik pemerintahan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, terlihat perubahan signifikan dalam pendekatan pembuatan kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan transparansi pemerintahan, meningkatnya partisipasi warga negara, dan upaya untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia sejak reformasi tahun 1998. Meskipun masih ada tantangan dan masalah yang harus diatasi, terdapat bukti perubahan positif dalam praktik pemerintahan Indonesia yang berkembang menjadi sistem demokratis yang lebih terbuka dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara pemerintahan otoriter dan demokratis dapat memengaruhi arah dan karakter pemerintahan suatu negara dengan cara yang signifikan (Pratikno, 2013).

Implikasi Gaya Kepemimpinan Otoriter di Berbagai Negara

Kepemimpinan otoriter seringkali dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, karena cenderung kurang mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak-hak dasar individu. Dalam sub bab ini, kami akan melihat beberapa kasus konkret di berbagai negara yang mendemonstrasikan hubungan antara kepemimpinan otoriter dan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dengan fokus pada beberapa negara yang mencerminkan perbedaan situasi dan konteks yang berbeda (Amnesty International, 2020).

1. Kasus Rusia - Pembatasan Kebebasan Berbicara dan Kriminalisasi Aktivis

Rusia adalah contoh yang signifikan dalam hubungan antara kepemimpinan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, kebebasan berbicara dan pers di Rusia telah menghadapi tekanan yang meningkat. Kriminalisasi aktivis politik, pembungkaman oposisi, dan pengawasan ketat terhadap media independen adalah taktik yang digunakan untuk mempertahankan kontrol

pemerintah (Human Rights Watch, 2022).

2. Kasus Venezuela - Krisis Kemanusiaan dan Pembatasan Hak Sosial

Venezuela adalah contoh lain yang mencerminkan hubungan antara kepemimpinan otoriter dan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konteks hak-hak sosial. Di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro, negara ini menghadapi krisis ekonomi yang parah dan penurunan akses masyarakat kepada makanan, obat-obatan, dan perawatan medis.

Pemerintah Venezuela telah menggunakan kekuasaan untuk membatasi akses ke bantuan kemanusiaan dan melarang organisasi-organisasi non-pemerintah yang mencoba membantu warga negara yang menderita. Ini menciptakan situasi di mana hak mendasar seperti hak atas makanan dan perawatan medis terancam, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih sering terjadi.

3. Kasus Tiongkok - Pengawasan Massal dan Pelanggaran Hak Privasi

Tiongkok adalah contoh yang signifikan dalam hal pengawasan

massal dan pelanggaran hak privasi yang berhubungan dengan kepemimpinan otoriter. Pemerintah Tiongkok telah mengembangkan sistem pengawasan yang luas, seperti sistem peringkat sosial dan pengawasan warga negara melalui teknologi pengenalan wajah.

Kasus penindasan terhadap minoritas etnis Uighur di Xinjiang adalah contoh nyata bagaimana kepemimpinan otoriter dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan penahanan massal, pemaksaan kerja, dan pelanggaran hak privasi yang ekstensif. Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan otoriter dapat digunakan untuk menghancurkan hak-hak individu dan minoritas.

4. Kasus Arab Saudi - Pembatasan Kebebasan Beragama dan Hak Perempuan

Arab Saudi adalah contoh kasus di mana kepemimpinan otoriter telah membatasi kebebasan beragama dan hak perempuan. Di bawah sistem pemerintahan yang sangat konservatif, praktik-praktik seperti penahanan aktivis hak asasi manusia dan pembatasan yang kuat

terhadap kebebasan berbicara telah menjadi umum.

Selain itu, Arab Saudi telah lama membatasi hak perempuan, meskipun adanya beberapa reformasi terbatas dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum reformasi tersebut, perempuan menghadapi pembatasan dalam mengemudi, perjalanan, dan pekerjaan, serta keterbatasan dalam hal perwalian. Ini adalah contoh bagaimana kepemimpinan otoriter dapat membatasi hak asasi manusia terutama dalam hal kebebasan beragama dan hak perempuan.

Kasus-kasus di atas memberikan gambaran tentang bagaimana kepemimpinan otoriter dapat berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pembatasan kebebasan berbicara, pengawasan massal, krisis kemanusiaan, dan pembatasan hak sosial.

Perbedaan dalam prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia menjadi lebih jelas ketika kita melihat praktik dan kebijakan di berbagai negara yang dipimpin oleh pemerintahan otoriter (Asia Watch, 1990). Dalam upaya untuk

mempromosikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, perlu ada perhatian yang lebih besar terhadap situasi ini dan upaya untuk memperjuangkan perubahan yang positif dalam perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia (Amnesty International, 2020).

Kesimpulan

Dalam penelitian ini kami telah menjelajahi hubungan antara kepemimpinan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia, dengan fokus pada beberapa kasus di berbagai negara. Melalui analisis kasus-kasus seperti Rusia, Venezuela, Tiongkok, dan Arab Saudi, kita dapat melihat bahwa pemerintahan otoriter seringkali menghasilkan situasi di mana hak asasi manusia menjadi rentan. Terlepas dari perbedaan konteks, negara-negara ini memiliki satu kesamaan, yaitu kurangnya akuntabilitas, transparansi, dan kontrol demokratis yang memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi tanpa hambatan.

Kasus Sergei Magnitsky di Rusia, krisis kemanusiaan di Venezuela, pengawasan massal di Tiongkok, dan pembatasan hak perempuan di Arab Saudi, semuanya menggambarkan bagaimana kepemimpinan otoriter

seringkali menciptakan situasi di mana hak-hak individu diabaikan atau bahkan diperlakukan dengan semena-mena. Meskipun ada upaya oleh organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk mengungkap dan melawan pelanggaran ini, perubahan substantif sering kali sulit dicapai dalam pemerintahan otoriter.

Dengan demikian, penting untuk terus memahami dampak kepemimpinan otoriter pada hak asasi manusia dan mendorong untuk memperkuat mekanisme pengawasan internasional serta dukungan bagi aktivis dan pembela hak asasi manusia. Semakin besar kesadaran global tentang isu-isu ini, semakin besar peluang untuk mendorong perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan yang lebih demokratis di seluruh dunia.

Saran

Dalam rangka mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kepemimpinan otoriter, para pihak terkait perlu mengambil beberapa langkah strategis. Pertama-tama, komunitas internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, negara-negara dengan sistem demokratis, dan badan-badan PBB,

harus terus memperkuat tekanan dan kritik terhadap negara-negara yang melanggar hak asasi manusia. Ini dapat mencakup sanksi ekonomi, pemantauan yang ketat, dan kampanye kesadaran internasional yang dapat mengekspos pelanggaran hak asasi manusia. Keberlanjutan dan konsistensi dalam menyoroti isu-isu ini penting untuk memberikan tekanan terus-menerus kepada pemerintahan otoriter.

Selain itu, para pihak terkait juga harus memberikan dukungan dan perlindungan bagi aktivis hak asasi manusia dan pembela hak asasi manusia di negara-negara yang terkena dampak kepemimpinan otoriter. Ini mencakup memberikan perlindungan bagi mereka yang berisiko tinggi, mengadvokasi untuk pembebasan tahanan politik, dan memberikan sumber daya untuk memungkinkan mereka untuk terus memantau, melaporkan, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Peningkatan kerja sama internasional antara pihak-pihak yang peduli juga penting untuk mengkoordinasikan upaya dalam menangani isu-isu hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kita dapat bergerak menuju dunia yang lebih adil, demokratis, dan menghormati hak-hak dasar semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H., Arjuniadi, A., & Kusma, A. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otoriter, Demokrasi dan Kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. *Jurnal Ekobismen*, 3(1).
- Amnesty International. (2020). *Harga dalam Berbicara: Pembela Hak Asasi Manusia dalam Ancaman di Indonesia*. <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2100192020ENGLISH.PDF>
- Asia Watch. (1990). *Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Timor Timur*. <https://www.hrw.org/reports/1990/05/01/human-rights-indonesia-and-east-timor>
- Aspinall, E. (2007). Konstruksi Keluhan: Sumber Daya Alam dan Identitas dalam Konflik Separatis. *Journal of Conflict Resolution*, 51(6), 950–972.
- Aspinall, E. (2013). Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Indonesia Pasca-Suharto. *Critical Asian Studies*, 45(2), 179–196.
- Gaol, B. L. (2022). Gaya Kepemimpinan Otoriter dan Kepemimpinan Kristen Terhadap Karyawan. *Filadelfia, Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 302.
- Hadiz, V. R. (2004). Dekentralisasi dan Demokrasi di Indonesia: Kritik terhadap Perspektif Neo-Institusionalis. *Development and Change*, 35(4), 697–718.
- Honna, J. (2011). Demokratisasi di Indonesia Setelah Runtuhnya Suharto. *Southeast Asian Studies*, 49(4), 503–526.
- Human Rights Watch. (2022). *No Title*. <https://www.hrw.org/>
- Huntington, S. P. (1991). *Gelombang Ketiga: Demokratisasi pada Akhir Abad Kedua Puluh*. University of Oklahoma Press.
- Indrawati, L., & Sembiring, E. E. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Pemerintah Daerah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(2), 169–177.
- Komnas HAM. (2022). *No Title*. <https://www.komnasham.go.id/>
- Kurniati, S. P., & Amrizal, R. (2007). Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kecenderungan kepemimpinan Otoriter dengan Intensi Turn Over. *Indigeneous: Jurnal Ilmiah Psikologi D.H. Kognisi*, 9(85).
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Authoritarian Kompetitif: Rezim Hibrida Setelah Perang Dingin*. Cambridge University Press.
- Mietzner, M. (2013). *Rekayasa Politik Demokrasi di Indonesia*. Oxford University Press.

- Nasir, M., Bulu' K, & Shaleh, M. (2021). Tipe Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 6(1), 38.
- Permana, D. (2021). Model Kepemimpinan Masa Depan Indonesia Dalam Perspektif Sipil dan Militer. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 4(1), 278.
- Pratikno, M. (2013). Demokrasi dan Dekonsentrasi di Indonesia: Tantangan dalam Teori dan Praktik. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(2), 191–213.
- Rahmadhanty, Dwi Rizky Farah, W. (2020). Pengaruh Gaya Hidup Sehat, Gaya Kepemimpinan, dan Tiime Budget Pressure Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. *JKUBS*, 1(1), 68.
- Rahmat, H., Alam, A. S., & Syamsu, S. (2018). Analisis Tipe Kepemimpinan Aras Tammauni di Kabupaten Mamuju Tengah. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 46.
- Suryadinata, L. (2004).). *Indonesia: Tahun Berbahaya*. Southeast Asian Affairs.
- Transparency International Indonesia. (2020). *Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2019: Indonesia*. <https://www.transparency.org/country/IDN>